

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur



Oleh:
MISBAHUL MUNIR
NPM.0671010089

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misbahul Munir
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Juni 1986
NPM : 0671010089
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Raya Wadung Asri 44 RT.02 RW.04 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan atau plagiat._____

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini dicurigai sebagai hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan. Dan apabila Pengadilan telah memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dimana isinya menyatakan bahwa skripsi ini adalah secara sah dan meyakinkan merupakan hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh._____

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya._____

Mengetahui
Ketua Program Studi

Surabaya, Januari 2012
Penulis

Pangung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Misbahul Munir
NPM. 0671010089

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disusun Oleh:

Misbahul Munir
NPM. 0671010089

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Misbahul Munir
NPM. 0671010089

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal :

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

- | | |
|---|---------|
| 1. <u>H. Sutrisno, S.H., M.Hum.</u>
NIP. 19601212 198303 1 001 | (_____) |
| 2. <u>Subani, S.H., M.Si.</u>
NIP. 19510504 198303 1 001 | (_____) |
| 3. <u>Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.</u>
NIP. 19620625 199103 1 001 | (_____) |

Mengesahkan,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Misbahul Munir
NPM. 0671010089

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal :

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

1. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. (_____)
NIP. 19601212 198303 1 001
2. Subani, S.H., M.Si. (_____)
NIP. 19510504 198303 1 001
3. Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. (_____)
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengesahkan,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Daftar Istilah

Akad - Perjanjian

Clan - Keluarga/Keturunan/Golongan

Definisi - Pengertian

Harta Bawaan - Harta yang diperoleh suami/isteri sebelum mereka menikah

Harta Bersama - Harta yang diperoleh dalam masa perkawinan

Harta Gono-gini - Harta bersama yang diberikan kepada suami/isteri ketika terjadi perceraian atau kematian dari salah satu suami atau isteri

Muhrim - Seseorang yang tidak boleh dinikahi

Prioritas - Yang diutamakan

Semenda - Saudara se-ayah atau se-ibu

Waris - Pembagian harta orang yang meninggal dunia terhadap ahli warisnya (suami/isteri, anak, orang tua, dan saudara)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Alloh SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama pengerjaan skripsi.
2. Bapak Panggung Handokao, S.sos., S.H., M.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta selaku Dosen Pendamping Skripsi yang selalu memberikan dukungan dan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.
3. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bekal ilmu serta nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Orang tua saya, yang selalu memberi semangat dan curahan kasih sayang tanpa henti dan telah mendukung secara moril maupun materiil.

5. Teman-teman seperjuangan, Yudi Prasetyo, S.H., Pringgo Angga Wijaya, S.H., Muhammad Rois, S.H., Yohenda Tri Alesta, S.H., Aditya Wisma Kurniawan, S.H., Ishaq, Adi Kurnia Pratama Putra, Nanda Hantara, serta segenap dosen, staff juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang belum disebutkan satu persatu.
6. Terakhir, untuk Calon Istri saya, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta curahan kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insya-Alloh akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kajian Pustaka	7
1. Definisi Perkawinan	7
2. Syarat-syarat Perkawinan	10
3. Pencatatan Perkawinan	17
4. Akibat Perkawinan	18
5. Perkawinan Siri	22
6. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan	23
7. Pembuktian Asal Usul Anak	25
8. Hak-hak Anak	27
F. Metode Penelitian	29
1. Metode Pendekatan	30

2. Jenis Penelitian	30
3. Sumber Bahan Hukum	31
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	32
5. Metode Analisis Bahan Hukum	32
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Kedudukan Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif	35
1. Sanksi Terhadap Pelaku Perkawinan Siri	38
2. Upaya Hukum	39
B. Kedudukan Hukum Anak Dalam Sebuah Perkawinan Siri	41
BAB III HAK-HAK ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Hak Pemeliharaan Anak Dalam Perkawinan Siri	50
1. Perawatan Dan Pendidikan Anak	50
2. Perwalian	53
B. Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim
- Lampiran 2 Surat Tembusan BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 3 Surat Pengantar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur
- Lampiran 4 Surat Keterangan Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 5 Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 6 Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Misbahul Munir
NPM : 0671010089
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Juni 1986
Program Studi : Stara 1 (S1)
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAKSI

Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah relatif lama diberlakukan, sebenarnya cukup untuk membentuk masyarakat sadar dan mengerti akan hukum dan Perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan Undang-undang tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan siri. Hal ini berdampak negatif terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak dari perkawinan tersebut. Pelaksanaan perkawinan siri, tentunya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Maka atas hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat di kemukakan yaitu, Pertama, bagaimana kedudukan hukum anak dari perkawinan siri menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan siri tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu mendiskripsikan secara sistematis dan menyeluruh dari obyek yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian semacam ini biasa disebut dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif normatif dan dijelaskan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, kedudukan perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum positif. Kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin bisa dianggap anak yang sah jika ia diakui oleh orang tuanya dan disahkan oleh Pengadilan. Dengan demikian anak luar kawin tersebut mempunyai status dan tercatat sebagai anak luar kawin yang diakui dan berhak atas biaya hidup, pendidikan, perwalian serta warisan dari ayahnya. Mengenai pembagian waris, anak luar kawin tersebut hanya mendapat bagian sepertiga dari yang semestinya diperoleh anak yang sah.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Kedudukan Hukum Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang pria maupun wanita pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama, hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.¹

Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi. Adapun pengertian perkawinan dalam hukum islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami isteri guna membangun rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan

¹ Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal. 19

norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mendambakan kehadiran anak. Kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami isteri yang bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antar pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam tersebut ada yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini

sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir”.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.²

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

² Rusli, An R. Tama, Perkawinan antar agama dan masalahnya, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 10

Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh Negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan).

Disamping itu para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini.

Pertama, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.³

Kedua, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran Undang-undang dengan asumsi bahwa antara Pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya.

Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut.

³ Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal. 73

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak dari perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pembangunan hukum, khususnya mengenai perkawinan siri dan kedudukan anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum dalam usaha penegakan hukum, khususnya mengenai perkawinan siri dan

kedudukan anak. Serta memberikan informasi bagi pembaca pada umumnya mengenai perkawinan siri dan kedudukan anak.

E. Kajian Pustaka

1. Definisi Perkawinan

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Perkawinan atau nikah menurut hukum islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.⁴

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh keluarga dan persekutuan adat. Perkawinan ini merupakan perikatan adat serta merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Dalam artian terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁵

⁴ Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 8

⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Adat, Alumni, Bandung, 2003, hal. 7

Menurut hukum adat, perkawinan memiliki sifat genealogis yang terdiri dari 3 (tiga) sistim perkawinan. Pertama, perkawinan patrilineal (perkawinan jujur), dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Dalam sistim ini dikenal adanya kawin ganti suami (levirat) atau kawin ganti istri (sororat), yaitu jika suami meninggal, maka isteri yang menjanda tersebut harus menikah lagi dengan saudara almarhum suaminya, begitu juga sebaliknya. Kedua, perkawinan matrilineal (perkawinan semanda), dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan, suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri serta anak keturunannya akan masuk dalam clan istrinya dan suami tidak memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Ketiga, perkawinan parental (perkawinan bebas), dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan, kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka.⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau

⁶ Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Perkawinan Adat, Airlangga University, Surabaya, 1986, hal. 8

miistaqom gholiidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga mendefinisikan tentang perkawinan, antara lain:

- 1) Menurut Soedharjo Soimin, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁷
- 2) Menurut Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁸
- 3) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹
- 4) Menurut Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

Perkawinan atau nikah pada prinsipnya adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-

⁷ Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 6

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermusa, Jakarta, 1978, hal. 23

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, hal. 6

¹⁰ Ibid, hal. 7

menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebijakan serta saling menyantuni antara keduanya.¹¹

Uraian tentang pengertian perkawinan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan luhur atau suatu ikatan lahir dan batin untuk meghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta saling mengasihi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu, adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

¹¹ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1

Menurut Sudarsono, syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu syarat materiil dan syarat formil.¹²

a. Syarat Materiil

Yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat materiil dibagi 2 (dua) yaitu:

1) Syarat Materiil Mutlak

Yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang siapa ia hendak dikawin.¹³

Adapun syarat materiil mutlak ini lebih di titik beratkan kepada orangnya yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 3

(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

¹² Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 17

¹³ Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hal. 140

- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 (2) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, "Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu".

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu. Ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu.

2) Syarat Materiil Relatif

Yaitu, syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif. Syarat tersebut yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU Perkawinan);
- g) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU Perkawinan);
- h) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Pemberitahuan Kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5).

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pengecualian terhadap jangka waktu itu, dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan yang penting.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya . Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Pemberitahuan dimaksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu orang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2) Penelitian Syarat-syarat Perkawinan (Pasal 6 dan Pasal 7).

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang, yaitu:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa, atau yang setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- c) Ijin tertulis/ijin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d) Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan;
- f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;
- g) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain.

Apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tuanya atau wakilnya.

3) Pengumuman Tentang Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan (Pasal 8 dan Pasal 9).

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan

melangsungkan perkawinan, juga memuat kapanpun dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.

Sehubungan dengan itu, perkawinan dapat dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Menurut Soemiyati yang dimaksud dengan rukun dari Perkawinan ialah "hakekat dari Perkawinan itu sendiri". Jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:

- a. Calon Suami dan Calon Isteri;
- b. Wali;
- c. Saksi;
- d. Akad Nikah (Ijab dan Kabul).¹⁴

Mengenai Perkawinan, jika syarat maupun rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak batal demi hukum akan tetapi perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

¹⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 30

3. Pencatatan Perkawinan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara perkawinan. Yaitu:

- Ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- Ayat (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan;
- c. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah;

- d. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai, masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

4. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

- a. Timbulnya Hubungan Antara Suami dan Isteri

Hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
- 4) Suami adalah Kepala rumah tangga dan isteri sebagai Ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya dan isteri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;

- 5) Suami dan isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia-menyetia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain;
- 6) Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami dan isteri bersama.

b. Timbulnya Harta Benda Dalam Perkawinan

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan isteri. Apabila ditentukan oleh suami dan isteri maka harta bawaan suami dan isteri tersebut menjadi hara bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan, suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin.

Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

- 2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;
- 3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

c. Timbulnya Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;
- 2) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Orang tua

mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

- 3) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki;
- 4) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun telah dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan terhadap anaknya;
- 5) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.

5. Perkawinan Siri

Perkawinan siri/Nikah siri muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Perkawinan siri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual-ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.

Perkawinan siri sering kita kenal dengan istilah Perkawinan di bawah tangan. Kata siri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia, yang berarti Perkawinan siri adalah perkawinan rahasia. Sedangkan pengertian perkawinan siri menurut hukum yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat-istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah, dalam artian perkawinan semacam ini tidak memiliki bukti otentik, sehingga dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Definisi perkawinan siri sendiri sangat beragam sesuai dengan kedalaman ilmu mereka masing-masing. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa nikah siri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:

- a. Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kyai atau tokoh masyarakat.
- b. Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Uusan Agama (KUA), atau akad nikahnya tidak dalam

pengawasan petugas pencatatan dari KUA bagi yang beragama islam, di Kantor Catatan Sipil bagi non-islam.

- c. Nikah siri ialah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya.¹⁵

Dilakukannya perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor.

Dari sebagian masyarakat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perkawinan siri, antara lain:

- a. Faktor Agama;
- b. Faktor Sosial Budaya;
- c. Faktor Pendidikan;
- d. Faktor Ekonomi;
- e. Faktor Birokrasi.¹⁶

6. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan isteri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari yang lain.¹⁷

¹⁵ Misbahul Munir, Nikah Siri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Siri, Antologi Kajian Islami Seri 10, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2006, hal. 159

¹⁶ Qualita Ahsana, Dialektika Keberagamaan Tradisi Nikah Siri, Musyawaroh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. IX. No. 2. Agustus 2007, hal. 133

¹⁷ Surojo Wignjodipuro, Asas-asas Hukum Adat., Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 108

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistim kekeluargaan masing-masing daerah.

Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak yang sah.¹⁸

Anak luar kawin ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Sedangkan Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, hal. 104

orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁹

Menurut Soedaryo Soimin, dalam hukum islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terkait perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar dari ketentuan itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.²⁰

Menurut Riduan Syahrani, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan, sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²¹

Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa, wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.²²

7. Pembuktian Asal-Usul Anak

Dalam hal pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan, bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

¹⁹ Wirjono Pradjodikoro, op.cit., hal. 96

²⁰ Soedarjo Soimin, op.cit., hal. 46

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1989, hal. 100

²² Hilman Hadikusuma, op.cit., hal. 133

- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya. Dilihat dari segi perlindungan hukum anak, maka hal ini sangat merugikan anak yang lahir di luar perkawinan, karena ia tidak berhak memperoleh biaya hidup dan pendidikan oleh ayahnya, yang turut menyebabkan ia lahir di dunia dan oleh karena itu seharusnya ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut.²³

Untuk dapat membuktikan asal-usul seorang anak dapat dilakukan dengan cara:

- a. Adanya akte kelahiran.
- b. Surat keterangan kenal lahir.

²³ Erna Sofwan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*, Kowani, Jakarta, 1996, hal. 29

- c. Kesaksian dua orang yang sudah dewasa, dilengkapi dengan surat keterangan dokter, bidan, dukun bayi dan lain-lainya.²⁴

8. Hak-hak Anak

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak.

Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

²⁴ Ibid, hal. 32

orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Abdur Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.²⁵

Setiap anak memiliki hak. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak pada umumnya, tetapi juga kewajiban antara orang tua dengan anaknya yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat 1);
- b. Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45 ayat 2);

²⁵ Abdur Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam, Fikahati Aneska, Jakarta, 1992, hal. 21

- c. Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (Pasal 46 ayat 1);
- d. Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, apabila orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya. (Pasal 46 ayat 2);
- e. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut. (Pasal 47 ayat 1);
- f. Bahwa orang tua berkewajiban mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47 ayat 2);
- g. Bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. (Pasal 48);
- h. Bahwa apabila seorang anak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal (Pasal 49 ayat 1):
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- i. Meskipun orang tuanya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. (Pasal 49 ayat 2).

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁷

Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang kedudukan hukum anak dari perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁸

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh.

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 9

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 6

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Instruksi Presiden (Inpres) Tanggal 10 Juni 1991 No. I Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan;
- 2) Jurnal dan artikel tentang perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.³⁰

Dalam pengertian lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan pustaka utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

²⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 52

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 19

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara umum dalam bab ini terdapat dua subbab, yakni yang pertama mengenai Kedudukan Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif. Dan subbab yang kedua adalah Kedudukan Hukum Anak Dalam Sebuah Perkawinan Siri.

Bab III, menguraikan tentang Hak-hak Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab yang pertama adalah Hak Pemeliharaan Anak Dalam Perkawinan Siri. Dan subbab yang kedua adalah Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri.

Bab IV, Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III di atas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya ditarik Kesimpulan dan Saran dalam bab IV sebagai penutup.